

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Belanja bantuan sosial (bansos) adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12, bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Jadi belanja bansos yang dikeluarkan pemerintah utamanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari risiko sosial (KSAP, 2022).

Berkaitan dengan belanja bansos, terdapat topik kurang sedap yang menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Contoh topik pembahasan tersebut antara lain isu seputar penyelewengan bansos pada saat pandemi Covid-19 (Aji, 2021), penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran (Purnama, 2022; Saputra, 2024), korupsi terkait dana bansos (Putra et al., 2024), ataupun indikasi pemanfaatan bansos disalahgunakan untuk tujuan populis mendulang suara calon pimpinan kepala pemerintahan petahana (Firmansyah et al., 2021). Salah satu penyebab dari beredarnya berita miring seputar belanja bansos adalah karena kurang

transparannya dalam menyajikan pelaporan kepada publik, karena transparansi adalah langkah awal yang memungkinkan berbagai penyimpangan terungkap dan diketahui publik (Aprilla et al., 2022). Sofyani & Tahar (2021) menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi, dengan tujuan agar informasi tersebut mudah dipahami dan dapat diawasi. Ketika belanja dilaporkan secara transparan, maka masyarakat akan dapat ikut mengawasi pelaksanaan belanja, sehingga dapat dicegah potensi penyelewengan yang mungkin terjadi (Putra, 2014, dalam Wida et al., 2023). Transparansi juga dapat membantu terwujudnya *good governance* yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat (Yahya, 2006).

Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan adalah dengan melaporkan kegiatan pemerintah sesuai regulasi yang telah disusun (Salle, 2017). Sebagaimana belanja lainnya, laporan belanja bansos selain tersaji pada bagian muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), juga diungkapkan pada bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD khususnya informasi-informasi penting lainnya yang tidak dapat termuat pada lembar muka. Bentuk pengungkapan belanja bansos diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), baik pada Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial ataupun Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua. Pada Buletin Teknis tersebut diatur informasi apa saja mengenai belanja bansos yang harus diungkapkan pada laporan keuangan pemerintah.

Sayangnya, dari hasil telaah penulis terhadap beberapa LKPD, diketahui konten informasi mengenai belanja bansos yang diungkapkan berbeda-beda dan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Salle (2017), belum sesuainya pelaporan sesuai dengan regulasi dalam hal ini belanja bansos dapat dimaknai jika pelaporan oleh pemda masih belum sepenuhnya transparan. Ketika laporan yang diterbitkan masih kurang transparan, dugaan terhadap penyelewengan seputar bansos akan berpotensi terus terjadi dan tidak terawasi dengan baik. Permasalahan transparansi ini juga pernah disampaikan pada penelitian terdahulu. Barus & Nasution (2022) mengatakan bahwa pada belanja hibah yang karakteristiknya menyerupai belanja bansos, pertanggungjawaban dan pelaporan kerap menjadi kendala dari rangkaian pengelolaan belanja karena adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Mempertimbangan fakta bahwa pengungkapan belanja bansos masih belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku, dan juga berkembangnya isu seputar penyelewengan belanja bansos, penulis tertarik untuk menganalisis faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial. Dengan diketahuinya faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan belanja bansos, maka selanjutnya pihak yang terkait dapat memperbaiki kualitas faktor tersebut. Apabila kualitas faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan belanja bansos telah ditingkatkan, seyogianya akan dapat mendorong pengungkapan belanja bansos yang lebih memadai, sehingga pelaporan berkenaan dengan belanja bansos menjadi lebih transparan. Transparansi akan mendorong terciptanya *good governance*, sehingga dapat mencegah terjadinya

fraud (Megasyara & Imawan, 2023), seperti isu-isu miring seputar belanja bantuan sosial. Di samping itu, ketertarikan penulis meneliti tingkat pengungkapan belanja bansos ini karena memperhatikan nilai bansos yang disalurkan oleh pemda. Pada tahun 2023, menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, jumlah rata-rata pengeluaran belanja bansos oleh seluruh pemda di Indonesia sebesar Rp22.268.705.165. Meskipun dari segi proporsi belum terlalu besar (1.35% dari rata-rata belanja operasional seluruh pemda), dengan melihat nominal penyaluran bansos tidak berlebihan jika belanja ini mendapat salah satu perhatian dari masyarakat.

Pada penelitian Darmastuti & Setyaningrum (2012), mereka menggunakan beberapa variabel independen yang mewakili faktor internal dan eksternal pemerintah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan belanja bansos. Maka pada studi kali ini, penulis juga memilih beberapa variabel independen yang dapat mewakili baik faktor internal dan eksternal pemerintah. Namun, penulis mencoba menggunakan beberapa variabel yang berbeda dari penelitian Darmastuti & Setyaningrum (2012), dengan harapan agar dapat memperluas cakupan studi mengenai pengungkapan belanja bansos.

Variabel yang diduga dapat memberikan pengaruh kepada tingkat pengungkapan belanja bansos dari faktor internal diantaranya tipe pemerintahan, rasio belanja bansos, dan calon petahana. Variabel-variabel yang dipilih mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel serupa untuk meneliti pengaruhnya terhadap pengungkapan LKPD. Pengaruh tipe pemerintahan terhadap pengungkapan informasi oleh pemda pernah diteliti oleh

Prasasti et al. (2017), dan Kurniati & Siddi (2020). Pengaruh belanja terhadap pengungkapan informasi oleh pemda telah diteliti oleh Puspita & Martani (2012), Putri & Setiawan (2022), dan Aziz & Hapsari (2020). Sedang pengaruh calon petahana belum terdapat studi langsung yang meneliti pengaruhnya terhadap pengungkapan informasi oleh pemda, meski terdapat penelitian oleh Habibi et al., (2018) yang berusaha mengungkap peran calon kepala daerah petahana memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Uraian lebih lanjut mengenai variabel yang termasuk faktor internal, diantaranya dari Prasasti et al. (2017) menyebut jika kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibanding kabupaten, sehingga pengungkapan laporannya menjadi lebih baik. Sehubungan dengan rasio belanja bansos, penulis mengacu studi Hendriyani & Tahar (2015), yang mengatakan jika semakin besar nilai belanja maka semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah. Mengenai calon petahana juga diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos, karena berdasarkan penelitian Gherghina (2011), petahana memiliki pemahaman lebih baik mengenai proses bisnis pemerintahan. Shapiro (2005) mengatakan bahwa terdapat potensi agen hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, maka dalam hal ini calon petahana juga berpotensi untuk menggunakan diskresinya dalam menyajikan mana informasi yang hendak diungkap ke publik.

Sebagaimana variabel faktor internal, pemilihan variabel faktor eksternal juga mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya. Variabel yang dipilih yaitu tingkat kepadatan penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh tingkat kepadatan penduduk yang diproyeksikan dari jumlah penduduk terhadap pengungkapan informasi oleh pemda telah diteliti oleh Hendriyani & Tahar (2015), Naopal et al. (2017), dan Dewi & Adi (2019). Sedang tingkat pengungkapan informasi oleh pemda yang dipengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pernah dipelajari oleh Najah & Purwari (2019), Jessica & Suhartono (2020), dan Puspa & Rahayu (2021).

Keterangan lebih lanjut mengenai pemilihan variabel eksternal pemerintah dijelaskan oleh peneliti yang melakukan riset lebih dahulu. Tingkat kepadatan penduduk dinilai dapat mendorong tingkat pengungkapan belanja bansos mengacu pada penelitian Budiarto & Indarti (2019), yang menyatakan tingkat kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Berkenaan dengan faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut Setyowati (2016) diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan LKPD. Dengan pemilihan variabel independen yang berasal dari studi terdahulu seputar pengungkapan LKPD secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih merinci temuan peneliti sebelumnya khususnya pada aspek pengungkapan belanja bansos.

1.2. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi fokus masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut antara lain:

- a. Bagaimana tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada Pemda kabupaten/kota?
- b. Apakah tipe pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos?
- c. Apakah rasio belanja bansos berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos?
- d. Apakah calon petahana kepala daerah berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos?
- e. Apakah tingkat kepadatan penduduk berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos?
- f. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos?

1.3. Tujuan penelitian

Atas penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis susun sebelumnya. Tujuan penelitian yang dimaksud antara lain:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada Pemda kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintahan terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial.
- c. Untuk mengetahui pengaruh rasio belanja bansos terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial.

- d. Untuk mengetahui pengaruh calon petahana kepala daerah terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial.
- e. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepadatan penduduk terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial.
- f. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial.

1.4. Ruang lingkup penelitian

Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka penulis menentukan batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Pembatasan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian.

Mengenai rentang waktu, penulis melakukan penelitian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pemilihan rentang waktu ini dinilai mengandung informasi yang masih relevan dengan masa penelitian, yang menggunakan salah satu variabel berupa calon kepala daerah petahana pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024. Sedang berkenaan dengan pemilihan subyek penelitian, penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah (pemda) kabupaten/kota di Pulau Jawa. Pemilihan subyek pemda di Pulau Jawa karena menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, realisasi belanja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemda di Pulau Jawa pada tahun 2023 sebesar 64% dari total belanja bansos yang dikeluarkan oleh seluruh pemda di Indonesia.

Sehingga, pemilihan pemda di Pulau Jawa diharapkan dapat mewakili pemda lain di Indonesia dalam hal pengungkapan belanja bansos pada LKPD.

1.5. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, dan juga pihak lain yang membaca hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian ini menjadi media bagi penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus.
- b. Penelitian ini menjadi referensi atas penelitian lain yang mengangkat topik serupa
- c. Penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemda dalam hal pelaporan belanja bantuan sosial.
- d. Hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pemeriksa laporan keuangan pemda pada periode berikutnya.

1.6. Sistematika Penulisan skripsi

Dalam menyusun Skripsi, penulis menuangkan hasil penelitian dalam 5 (lima) bab. Ringkasan isi tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, serta kerangka pemikiran dan hipotesis awal atas penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta analisis dan pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis, pembahasan, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian, saran untuk pihak terkait, serta keterbatasan penelitian.